

Tulus Sudarto

TEOLOGI MAGISTERIUM DAN KONSERVATISME GEREJA: SEBUAH STUDI ATAS AJARAN KONTRASEPSI

ABSTRACT

There has been a significant change in the Church as a *communio* since the second Vatican Council (1962-1965). The Council seemed to instigate a mode of doing theology with liberal overtone. New ways of looking at things had been shown quite impressively by the Church ever since. Indeed “*Ecclesia semper reformanda*”. This, however, is not the whole story, for in the case like contraception, and worse still, on magisterium in general, it turns out that the Church hardly changes. The dilemma has brought about many problems, practically as well as theologically. This article talks about the dilemma.

Key Words:

*Teologi magisterium • Ketaatan religius • Kontrasepsi • Kontravita •
Hatinurani kristiani*

Tampaknya, rasa was-was lebih dominan muncul ketimbang optimisme ketika Kardinal Ratzinger dipercaya oleh Allah sebagai penerus Tahta Santo Petrus yang ke-265. Tanpa berlebihan, banyak orang memandang ciut soal masa depan gereja di bawah kepemimpinan seorang teolog konservatif. Di saat gereja merangsek maju dan berkecimpung lebih progresif dalam menanggapi tanda-tanda zaman sebagai inkorporasi spiritualitas Konsili Vatikan II (GS 4), suksesi kepemimpinan gereja tampak mengecilkan capaian kemajuan gereja sampai saat ini. Orang buru-buru digelisahkan oleh perkara krusial tentang posisi konservatisme dengan masa depan gereja *per se*.

Fakta berbicara bahwa para kardinal menetapkan pengganti Karol Wojtyla yang memiliki posisi tradisional dalam hal ajaran gereja¹. Tentulah pilihan atas Paus Benediktus XVI bukanlah sembarang keputusan tanpa melihat permasalahan aktual yang dihadapi gereja. Siapa tahu berlaku adagium populer, yaitu kardinal konservatif justru menjadi paus progresif seperti Paus Yohanes XXIII. Di sinilah penyelenggaraan ilahi (*providentia divina*) sangat berperan.

Selain soal imam perempuan, aborsi dan eutanasia, salah satu wacana hangat sekitar konklaf kemarin adalah kontrasepsi. Sejarah gereja menampilkan sisi unik dari permasalahan kontrasepsi ini. Sejak abad ke-4 diskusi tentang kontrasepsi sudah muncul hingga sekarang. Pertanyaan logis yang lantas muncul adalah, mungkinkah masalah kontrasepsi berakar dari teks kitab suci sendiri yang *nota bene* senantiasa lintas ruang-waktu? Pertanyaan ini sangat bersinggungan dengan status ajaran *per se*. Magisterium tentang kontrasepsi, karena bobot ajaran yang melekat padanya, oleh gereja dipandang sebagai pewahyuan dari Allah sendiri.

Menurut konstruksi sosiologis modern, gereja dianggap sedikit lancang mengurus persenggamaan orang per orang. Ajaran yang sampai menyentuh keputusan paling privat, mungkin sampai jenis kondom macam apa yang harus dipakai, selama ini hanya dilakukan oleh negara komunis-sosialis. Seberapa kontradiktif posisi gereja dalam hal ini?

Ajaran Awal

Dalam sejarah gereja katolik, KV II merupakan sebuah lompatan kuantum. Ada banyak perubahan mendasar yang dilakukan, menyangkut baik kebutuhan internal gereja maupun pandangan terhadap dunia. Apakah perubahan tersebut juga berlaku pada ajaran tentang kontrasepsi? Ternyata tidak. Salah satu panggilan dasar Paus adalah mempertahankan ajaran para pendahulu mereka. Yang menarik

adalah seberapa efektif semangat untuk kembali ke sumber tersebut? Sejauh mana kita bisa mengindikasikan masa depan gereja dengan konsep tradisional berkaitan dengan kontrasepsi?

Sommer menunjukkan gambaran kasar tentang alur sejarah ajaran gereja sejak awal sampai dengan *Humanae Vitae*.² Kristianitas perdana menghadapi penolakan Gnostik pada institusi perkawinan. Stoisme ikut mempengaruhi apresiasi negatif terhadapnya. Orang tidak akan mencapai taraf tertinggi dari jiwa dalam mendapatkan pengetahuan karena telah tercampur dengan jiwa orang lain, khususnya wanita yang masih subordinat. Seks adalah hal terendah dalam nomenklatur manusia. Hubungan seksual sejauh perlu untuk meneruskan kemanusiaan.³

Sommer menunjuk ada banyak teks referensi untuk perkawinan dan seksualitas dalam Kitab Suci, namun tidak ada satu bacaan pun baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang berbicara khusus tentang kontrasepsi. Teks Kej 38:4-10 sering dirujuk oleh para teolog sepanjang zaman. Yudas memerintahkan Onan untuk menikahi Tamar. Onan tidak ingin memiliki anak. Akhirnya Tuhan menghukum Onan dengan kematian.

Pada era Agustinus (354-430), ada perubahan signifikan mengenai makna kehidupan. Semula Agustinus menjadi pengikut Manikeisme yang didirikan oleh Mani (216-276? M), sebuah agama mistik yang berkembang di Afrika Utara dan dipengaruhi oleh gnostisisme. Berdasar kisah Adam-Hawa, ia yakin kesenangan seksual muncul karena tidak dikontrol oleh akal. Keperawanan sangat menonjol sebagai ajaran. Bagi Agustinus, perkawinan memiliki tiga nilai dasar yaitu prokreasi, iman dan sakramen.⁴

Dari abad 7 sampai 11, ada sedikit kemajuan pada teologi Barat. Karya teologis utama adalah tentang Penitensial, yaitu sistem kodifikasi dosa menurut materinya dengan penitensi setimpal bagi dosa tersebut. Ajaran bapa-bapa gereja menjadi format legal yang mendasari para biarawan untuk membuat kodifikasi tersebut. Terhadap kontrasepsi, Penitensial menyebut hubungan yang steril adalah dosa. Bobot dosa interkos selama kehamilan lebih sedikit dibanding interkos dengan orang yang steril.⁵ Dokumen *Si Aliquis* (1010) disebut-sebut merupakan ajaran pertama gereja tentang kontrasepsi.

“If someone, in order to satisfy his passion or pushed by deliberate hate, does something to a man or to a woman of such a sort that infants cannot be born from them, or if he gives them potions of such kind that they cannot either generate or conceive, such action shall be considered as homicide”.⁶

Gratianus mengeluarkan dekret yang melawan seks oral dan anal. Pada tahun 1230, Paus Gregorius IX meminta Raymundus untuk membuat kompilasi kanon baru tentang perkawinan. Salah satu butir menyebutkan bahwa kontrak perkawinan yang dibuat untuk tidak memiliki anak adalah invalid. Paus Innosens III juga menegaskan bahwa segala kesenangan seksual dalam perkawinan adalah tindakan dosa.

Sepanjang abad 11, dari Jerome (340-420) sampai Raymundus (1230), teologi katolik menganggap kontrasepsi merupakan bentuk pembunuhan (*homicide*).⁷ Ajaran ini ditegaskan lagi oleh Uskup Caesarius dalam Konsili Worms yang menyatakan bahwa sterilisasi identik dengan *homicide*. Albertus Agung (1193-1280) mendeskripsikan sterilisasi sebagai pembunuhan dalam tiga kategori: (1) tiada kepastian seorang anak akan lahir, (2) membunuh orang yang hidup masih lebih buruk daripada membunuh calon manusia; (3) hukuman Tuhan atas Onan tidak menunjukkan bahwa kontrasepsi seserius pembunuhan.⁸

Dalam karya awalnya yang berjudul *On the Sentences*, Thomas Aquinas (1225-1274) tidak menganggap kontrasepsi sebagai pembunuhan. Dalam *Summa Theologia*, ia meyakini bahwa kodrat merupakan norma tertinggi moralitas sehingga kontrasepsi adalah dosa melawan kodrat. Perkawinan sendiri secara substansial sesuai dengan penalaran kodrat dan hukum ilahi. Akan tetapi, konkupisens tidaklah datang dari setan dari kodrat melainkan dosa asal (*originale peccatum*). Pandangan ini sama dengan posisi Anselmus dan Agustinus. Aktivitas seksual ditetapkan oleh Allah. Setiap tindakan yang dengan sengaja bertujuan anti-prokreasi berarti jelas-jelas melawan hukum kodrat.

Dari tahun 1250-1450 ada formasi latar rasional dalam pengajaran tentang kontrasepsi. Otoritas skriptural tidak dibutuhkan dalam menolak kontrasepsi. Perkawinan steril tidak diperbolehkan, terutama mereka yang belum berumur. Sintesis abad pertengahan diperkenalkan oleh Martin Le Maistre (1432-1481), seorang teolog Farisi, yang mengikuti aliran Aristoteles. Ia mengajukan argumentasi kelayakan umum interkos seksual di antara pasangan menikah. Motivasi laik untuk aktivitas perkawinan tidak semata demi prokreasi tetapi juga menghindari pelacuran serta hasrat kesenangan belaka. Maka segala motivasi tersebut bukanlah dosa.

Pandangan ini memanen pro-kontra. Kardinal Cajetanus, seorang Thomis, menyatakan bahwa tujuan kodrati setiap interkos adalah prokreasi dan karenanya kesenangan (*pleasure*) bisa baik sekaligus buruk. Katekismus Roma (1566) juga mengajarkan demikian. Bulla yang dikeluarkan Paus Sixtus V, *Effraenatem* (1588), mengutuk aborsi dan kontrasepsi sebagai pembunuhan-insani yang memiliki

konsekuensi hukuman ekskomuniasi yang diresevir oleh Tahta Suci. Inilah adalah kutukan kepausan pertama terhadap kontrasepsi. Paus Gregorius XIV melanjutkan ajaran tersebut.

Situasi ini bertahan sampai masa Alphonsus Ligouri (1697-1787). Baginya, tanda afeksi cinta mutual antara pasangan menikah adalah sesuai hukum. Namun cinta bukanlah tujuan atau akhir dari perkawinan. Pasangan yang menikah diijinkan untuk abstain dari hak perkawinan ketika mereka tidak mampu mendukung atau mendidik anak. Interkos yang kurang lengkap tidak dikutuk secara mutlak. Obat-obatan diperbolehkan dalam mengurangi hasrat seksual. Namun, ia tetap pada pandangan tradisional bahwa kontrasepsi adalah pembunuhan-insani. Hanya pandangan Ligouri memberi equilibrium terhadap rigorisme penolakan terhadap kontrasepsi.⁹

Abad ke-19 memperlihatkan permulaan propaganda terbuka pada pengaturan kelahiran, khususnya di Inggris dan Amerika. Thomas R. Malthus (1766-1834), promotor KB tersebut, mengeluarkan buku yang berjudul *An Essay on the Principle of Population* tahun 1798. populasi berkembang secara geometris sementara suplai makanan berkembang hanya secara aritmatik. Solusinya bukan kontrasepsi tetapi kontrol-diri moral.¹⁰ Dari tahun 1816-1842 Penitensaria Suci Kuria Roma mempertanyakan kooperasi istri dengan suami yang mempraktekkan pengaturan tersebut. tahta Suci menegaskan bahwa penggunaan perkawinan yang tidak sempurna, baik dengan *coetus interruptus* atau pemakaian kondom, secara intrinsik jahat (*in se malum*).

Pada tahun 1842 Paus Pius IX menegaskan ajaran Tahta Suci tersebut. Sementara program KB semakin subur di Perancis. Para teolog Prancis memakai legitimasi Ligouri dalam mengutuk berdasar kisah biblis tentang Onan. Dari sinilah kata onanisme dikenal, sebagai derivasi kata pencabutan oleh pihak suami ketika berhubungan (*coetus interruptus*). Pada tahun 1880, Paus Leo XIII mempromulgasikan ensiklik *Arcanum Divinae Sapientiae*. Dokumen ini menegaskan kesucian perkawinan tetapi tidak secara eksplisit bicara tentang kontrasepsi sebagai kejahatan.

Pada tahun 1909 kekuatan utama Gereja Katolik Roma dalam menentang KB mendapat tanggapan luas. Seorang Yesuit Belgia, Arthur Vermeersch, mengeluarkan surat pastoral pada tanggal 2 Juni 1909 yang mengecam kontrasepsi. Langkah ini diikuti oleh Jerman (20/8/1913), Prancis (7/5/1919), Austria (23/1/1919) dan Amerika (26/9/1919). Pemakaian kondom oleh suami menempatkan istri pada resistensi yang sama karena istri 'diperkosa'. Demikian argumen kecaman tersebut berbunyi. Penitensaria Suci mengkonfirmasi

pendapat Vermeersch ini sehingga pada tahun 1930 ia diangkat menjadi pemimpin teolog moral di Roma. Ia pula yang membantu pembuatan ensiklik *Christian Marriage* yang dikeluarkan oleh Paus Pius XI pada tanggal 31 Desember 1930.

Perubahan radikal dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan turut serta memberi dampak apresiasi terhadap lembaga perkawinan. Paus Pius XII, dalam konstitusi apostolik *The Church in the Modern World* (1951), tidak menolak unsur kesenangan dalam interkos perkawinan tetapi sangat mengecam hedonisme. Sejak saat itu gereja dengan tegas merumuskan dua tujuan utama perkawinan, yaitu prokreasi dan pendidikan anak.¹¹

Pada tanggal 12 September 1958 Paus Pius XII bicara tentang pil yang mengakibatkan sterilisasi. Kalau dipakai dengan tujuan mencegah kehamilan, pil tersebut secara intrinsik jahat. Kalau dipakai untuk tujuan penyembuhan, tidak masalah. Para teolog moral Amerika menentang pendapat paus karena hal itu bukanlah kompetensi gereja. Lagian, gereja tidak tahu sama sekali persoalan kontrasepsi dari segi ilmiah. Akibatnya, pada bulan Juni 1964, Paus Paulus VI mengumumkan bahwa gereja telah melakukan riset atas problem kontrasepsi. Katanya:

“But the Church must also affirm her competence, that is to say that it is the law of God, which she interprets, teaches, promotes and defends; and the Church will have to proclaim this law of God in the light of scientific, social and psychological truths which lately have had new and very extensive study and documentation”.¹²

Pernyataan Paus Paulus ini berarti selinier dengan ajaran Paus Pius XII dan memandang bahwa ajaran tersebut valid. Dan Paus Yohanes XXIII, lewat ensiklik *Mater et Magistra*, juga mengecam kontrasepsi sebagai alternatif pengendalian pertumbuhan populasi. Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* secara implisit juga menunjukkan posisi sama. Draf *Skema 13* tentang perkawinan dan keluarga dibuat oleh Haring. Yang ditolak adalah kondom dan penarikan yang bersifat kontraseptif (*coetus*).¹³

Proses diskusi panjang pada gilirannya melahirkan ensiklik *Humanae Vitae* (1968). Pokok-pokok gagasan adalah sebagai berikut: (1) kesucian hidup manusia; (2) hidup perkawinan memiliki martabat dan nilai pada dirinya sendiri; (3) seksualitas manusia adalah nilai berharga pada perkawinan; (4) mentalitas kontraseptif yang egois dan tak bertanggung jawab adalah salah; (5) adanya fakta penolakan dalam menerima martabat manusiawi dalam banyak bidang kehidupan khususnya perkawinan.

Perdebatan yang Tak Berkesudahan

Sikap tradisionalis-konservatisme yang diambil gereja atas permasalahan kontrasepsi mengundang pro-kontra. Beberapa teolog setuju pada ajaran konstan gereja. Yang lain menyangsikan keterbatasan pengetahuan saintifik yang dipakai oleh gereja.¹⁴ Argumen saintifik menunjukkan bahwa perkembangan pengetahuan mutakhir tidak mengindikasikan moralitas tertentu. Secara objektif, pencapaian teknologi kontrasepsi harus diapresiasi sebagai lompatan kecerdasan manusia. Secara moral, dikembalikan pada masing-masing pelaku.

Tema perdebatan lain berfokus pada prinsip baik-buruk yang harus dilepaskan sebagai dasar ajaran. Sejauh kontrasepsi tidak berasal dari egosentrisme, ia tidak perlu dikecam. Yang lain mengutuk kontrasepsi artifisial dalam dunia aktual dewasa ini. Dan seterusnya.

Pendekatan sosiologis menunjuk pada ketakutan akan efek domino yang mungkin muncul andaikan gereja mengizinkan kontrasepsi.¹⁵ Pendekatan restriktif yang ditempuh oleh gereja dikenal dalam disiplin ilmu moral sebagai *slippery slope*. Secara harafiah, kata tersebut berarti lereng yang curam dan licin. Dalam wilayah moral, sebagaimana dinyatakan oleh Montesquieu (1748), ungkapan ini hendak menunjuk suatu situasi sulit yang kalau kita membuka atau mengendorkan ikatan moral tertentu maka orang akan melakukan lebih jauh daripada apa yang dikendorkan tersebut dan diikuti oleh hal-hal lain yang lebih berat.¹⁶ Tampaknya hanya gereja saja yang mengambil sikap radikal semacam ini. Cemas gereja mengacu pada perilaku seks yang semakin bebas. Namun, andaikan ini ditempuh, gereja sama saja mengikuti aliran determinisme atau konsekuensialisme. Kedua aliran tersebut ditolak secara terang-terangan dalam *Veritatis Splendor*. Paus bahkan menyebutnya sebagai krisis sejati (*a genuine crisis*) atas berbagai pendekatan ilmiah selama ini terhadap permasalahan tertentu.

Gugatan lain mengacu pada pola kepemimpinan gereja. Apa yang diajarkan oleh Paus adalah tidak cacat baik secara imani maupun moral. Inikah yang membuat gereja harus tunduk pada sistem magisterium tersebut? Benarkah posisi tradisionalis ditempuh karena beban pendahulu yang mengatasnamakan unsur infalibilitas Paus dalam menerapkan ajaran iman dan moral (LG 28)? Sebab, andaikan ajaran tertentu ditolak, berarti Paus meruntuhkan kredibilitas Paus pendahulu yang telah mengajarkan hal serupa. Dari situlah, Paus Yohanes Paulus II *hanya* memohon maaf atas sikap dan arogansi pendahulu terhadap Galileo Galilei. Namun, atas nama gereja, Paus tidak menarik sanksi eks-komunikasi tersebut.

Komplikasi permasalahan datang juga dari bawah. Contohnya adalah Surat Pastoral MAWI 1972. Dengan demikian, apakah sah-sah saja kita menerapkan dua wajah teologi moral: antara segi hukum-formal dan pastoral-praksis? Hukum adalah seperangkat aturan minimal yang harus ada karena memiliki moralitas tertentu yang diperjuangkan. *Nab*, karena berfungsi sebagai standar minimal, berlaku juga aspek pastoral-praksis yang mungkin tidak sama dengan aspek hukum. Bukankah kata-kata bijak “tidak usah merasa berdosa” yang dikeluarkan oleh para uskup tersebut juga menjadi magisterium? Lalu, bagaimana hal itu harus dipahami?

Argumen psikologis juga menunjukkan kepentingan tersendiri dalam kontrasepsi.¹⁷ Secara psikologis, kontrasepsi berbahaya dan karenanya tidak laik secara moral. Lestapis menyebut kecenderungan menonjol tersebut sebagai peradaban kontraseptif (*a contraceptive civilization*), menunjuk pada sikap hedonisme yang lebih mengancam peradaban daripada lonjakan pertumbuhan penduduk. Para pendukung kontrasepsi sangat dipengaruhi oleh Freud yang menyatakan tidak ada keraguan apapun di dalamnya. Kepuasan seksual lebih baik daripada kesulitan yang ditimbulkan karena memiliki anak tambahan.

Pendekatan yang dilakukan oleh Grisez sedikit membuka wawasan berkaitan dengan tiga teori hukum moral, yaitu teori hukum-kodrat konvensional, teori situasionalisme dan teori pragmatisme.¹⁸ Karakter hukum kodrat adalah objektivitas norma moral. Kebaikan dan keburukan moral dapat dipilah secara sederhana dengan membandingkan pola esensial dari tindakan manusia dengan struktur rasionalitas kodrat manusia. Ketiga teori mengerucut pada kebebasan individu. Nah, masing-masing teori mengapresiasi secara berbeda terhadap kebebasan tersebut. Hukum kodrat menempatkannya dalam kacamata kristiani, yaitu sebagai anak-anak Allah.

Dalam artikel lain, ia menyebut adanya ketidaktetapan posisi terhadap imoralitas pada kontrasepsi melainkan hanyalah penolakan (*deterrence*) konstan-praktis atas tindakan kontraseptif.¹⁹ Pendekatan teoritis terbaru menunjukkan perbedaan pada (1) aspek *prescriptif* ungkapan moral, (2) *kriteria* untuk moral individual, (3) muatan *deskriptif* pernyataan moral, (4) adanya petunjuk-petunjuk yang masuk dalam kriteria tersebut. Budi, argumen, teori dan definisi eksplisit orang kristen mengungkap nuansa tersebut. Hukum kodrat, sebagaimana dipakai sebagai tameng ajaran tentang kontrasepsi, harus dirinci dalam kriteria yang jelas.

Secara detil, Connor menganalisis kontrasepsi dalam kategori melawan kehidupan (*contralife*).²⁰ Ia memfokuskan pembicaraan pada hakikat-diri (*esse*), yaitu sebagai dasar segala kebaikan dan mengatur objek moral. Jenis perbuatan perlu

dibedakan dengan intensi perbuatan tersebut. Aspek inilah yang alpa dalam ajaran gereja tentang kontrasepsi. Gereja tidak memberi tempat apapun dalam motivasi di balik tindakan yang diambil, sungguhpun itu dilakukan oleh pasangan katolik paling saleh sekalipun.

Persoalan tersebut konkrit dalam lapangan ketika banyak keluarga katolik juga menjalani program *Natural Family Planning*. Padahal NFP juga dinyatakan sebagai bentuk kontrasepsi.²¹ Faktor motivasi dalam menjalankan NFP ikut mempengaruhi baik-buruk secara moral. Ini juga hendak mengantisipasi persoalan ketika pasangan suami istri yang menolak kontrasepsi tetapi dengan motivasi keliru, misalnya karena tidak menghendaki anak. Kelemahan pendekatan ajaran gereja terhadap kontrasepsi terletak pada penekanan pada tindakan mekanis (*behavioral*) dan mengabaikan motivasi dari tindakan tersebut.

Antara Harinurani vs Magisterium

Permasalahan dasar berkisar pada dilema harinurani kristiani *vis-a-vis* magisterium. Dan tampaknya perdebatan tersebut terus berlanjut dengan terpilihnya Kardinal Ratzinger menjadi Paus. Nyaris secara serentak, media massa menampilkan berita perlawanan terhadap Paus Benediktus XVI. Kebijakan frontal datang dari pemerintah Spanyol yang secara legal mengakui adanya perkawinan sejenis dan adopsi anak.²² Inilah sambutan hangat untuk Paus baru kita. Ketika gereja dihadapkan pada gerakan internasional berkaitan dengan progresivitas ajaran tentang kontrasepsi, para kardinal menetapkan dengan bulat seorang pemimpin yang (ultra)konservatif.

Permasalahan sangat konkrit.²³ Umat katolik yang mencapai 1,1 milyar ini terpecah. Amerika Latin dan Selatan tergolong taat hukum. Eropa sudah sedemikian *morsal*. Di paroki-paroki Amerika banyak pastor mengizinkan pemakaian kontrasepsi, juga aborsi, supaya gereja tidak ditinggalkan. Di Jerman, ada pastor yang diberi otoritas khusus untuk memberi surat keterangan eutanasia bagi pasien tertentu. Dengan surat tersebut, pihak direksi rumah sakit akan mengabulkan permintaan eutanasia dari pasien. Ini bentuk kerjasama paling mutakhir antara gereja dan pemerintah menyangkut persoalan mendasar tentang kehidupan.²⁴

Fakta menunjukkan ada begitu banyak pasangan kristiani yang tidak mau tahu ajaran gereja tentang kontrasepsi. Mereka bisa dengan nyaman memakai alat-alat tersebut. Andaikan disosialisasikan ajaran gereja ini, aneka masalah muncul. Tidak hanya bahwa mereka sudah sedemikian lama terbiasa dengan alat kontrasepsi

maupun kontravita yang tersebar murah di banyak tempat. Akses ke sana pun sangat mudah. Memberi tahu mereka tentang penolakan gereja atas ajaran resmi tersebut sama saja membangun rasa bersalah yang drastis pada mereka.

Secara menarik McCormick meneliti fase-fase perubahan pola pengajaran gereja.²⁵ Muktamar Vatikan II dipakai sebagai tonggak perubahan. Magisterium *pra*-konsili mencirikan karakter hirarkis-piramidal, tertutup kepada media massa apapun, tidak mengenal kompleksitas permasalahan, eksklusivitas teologi tunggal berdasar infalibilitas paus, status klerus lebih superior daripada awam, non-ekumenis, dan dominan terhadap budaya apapun. Secara singkat, teologi magisterium *pra*-konsili bergerak dalam tiga poros: sebagai pelaksanaan otoritas (*the exercise of authority*), menuntut kesetiaan mutlak (*obediential*), dan para teolog sebagai penafsir adalah agen hirarki.

Sementara, teologi magisterium *post*-konsili berubah. Gereja memandang diri sebagai *communio*. Desentralisasi otoritas dikembangkan. Teologi bukan privasi para klerus belaka, tetapi bernilai pasar (*marketable*). Pada pokoknya, gereja mencitrakan diri sebagai pembelajar (*ecclesia dicens*) sekaligus pengajar (*ecclesia docens*). Menurut Curran, hakikat gereja terletak di dalam fungsi sebagai pengajar (hirarki resmi) dan belajar (semua anggota).²⁶ Namun watak hirarkiisme ditanggalkan. Dasar teologi (*fons theologiae*) didasarkan pada pengalaman dan refleksi kaum beriman (*sensus fidelium*).

Menuju Inkorporasi Ajaran

Menurut Yohanes XXIII, sebagaimana dikutip McCormick, ada perbedaan pokok antara substansi ajaran dan rumusan. Substansi menyangkut 'kebenaran di dalam dirinya sendiri dan dalam keabsahan yang melekat padanya'. Sementara rumusan menyangkut 'formulasi historis partikular'. Contohnya adalah transubstansiasi, dosa asal dan seks *pra*-nikah.

Loyalitas kaum beriman ditunjukkan dalam konteks apa yang disebut Wojtyla sebagai komunitas otentik (*authentic community*). Ada tiga karakteristik komunitas sejati, yaitu solidaritas, oposisi dan dialog. Solidaritas adalah 'perilaku komunitas yang menganggarkan kondisi partisipatif anggotanya'. Berarti siap untuk menerima dan mewujudkan *sharing* yang lain dalam komunitas. Oposisi merupakan 'secara esensial perilaku solidaritas'. Sikap ini muncul dari kecintaan yang mendalam serta berorientasi pada kebaikan bersama (*common good*). Jadi tidak

identik dengan penolakan keanggotaan, melainkan konstruktif. Sementara dialog mengizinkan untuk 'memilah dan menerangi apa yang benar dalam situasi kontroversial'. Kehidupan komunitas yang konstruktif tidak mengandalkan konformisme (*servile conformism*) ataupun keengganan untuk terlibat (*non-involvement*). Keduanya mengacu pada uniformitas daripada unitas.

Usaha untuk mengasimilasi yang berakhir dengan penolakan (*dissent*) merupakan proses berdoa. Kepatuhan untuk menerima ajaran merupakan bentuk keterbukaan dan tanggung jawab dalam usaha untuk menerima secara tepat (apropriasi) ajaran. Jadi bukan sekedar penerimaan (*assent*) tanpa asimilasi kritis secara personal. Itulah kesetiaan kreatif (*creative fidelity*).²⁷

Selebihnya, secara prinsipial, setiap ajaran resmi mengikat batin orang katolik. Sengaja melanggar dengan tujuan-tujuan khusus dianggap berdosa, bahkan *in se malum*. Di pihak lain, melaksanakan dengan setengah hati juga belum menunjukkan kekatholikan yang sejati. Bagaimana pendekatan yang paling seimbang atas permasalahan ini?

Sebuah 'katekismus hati'

Terhadap ajaran resmi, umat beriman harus menerima dalam ketaatan religius akal budi dan kehendak (*obsequium religiosum*). Atas berkuasanya ajaran gereja dalam setiap individu, tidak sedikit orang memiliki kesan bahwa katolisisme bukan lain adalah 'rasa bersalah'. Mungkin inilah pergumulan sejati untuk menunjukkan bobot kekristenan yang sejati *versi* para teolog moral yang pandangan teologinya dianggap superior atas pandangan teologis pribadi per pribadi.

Namun, pada dasarnya sentralitas iman adalah pertama-tama buah Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak bisa dimonopoli oleh segelintir orang, betapun salehnya mereka.²⁸ Aksioma klasik memberikan prinsip dalam mengambil keputusan: *In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas*. Ini juga menunjuk pada bobot paradoks nilai keutamaan kristiani, yaitu kebebasan dalam ketaatan, kemerdekaan dalam kepatuhan. Persis seperti nilai salib yang menjadi karakter kristianitas: mati dalam hidup, hidup dalam mati, mendapatkan nyawa dalam kehilangan, kasih dalam pengorbanan. Dalam hal ini, rumusan Rahner tentang 'katekismus hati' sangat visioner.

Dari penjelasan ini, tampaknya pertanyaan tentang hatinurani kristen berhadapan dengan magisterium mungkin memang melebihi pertanyaan tentang otonomi dan kebebasan pribadi. Tarik ulur bergerak dalam wilayah abu-abu, antara ajaran dan keyakinan pribadi, antara keputusan personal dan pedoman, antara

individualitas dan kolektivitas, dan antara rasa bersalah dan katolisisme, atau malah antara *system error* dan *human error*. Apakah ajaran resmi seperti *malingenie*, 'si akal usil', menjadi ekor yang dikejar oleh kucing itu sendiri?

Wallabu'allam.

Tulus Sudarto

*Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma,
Yogyakarta*

End Notes:

1. Kusmaryanto, CB, "Warisan Paus Yohanes Paulus II: Budaya Kematian vs Budaya Kehidupan", dalam *Hidup*, 17 April 2005, h. 25.
2. Sommer, Joseph, *Catholic Thought on Contraception through the Centuries*, Missouri: Liguorian Pamphlets and Books, 1970, h. 14.
3. *Ibid*, h. 18-19.
4. *Ibid*, h.24-26.
5. *Ibid*, h. 29.
6. *Ibid*, h. 30. Kodifikasi disumbang oleh Yves dari Chartres, Gratianus, Peter Lombard, Huguccio dan Raymundus dari Penafort. Sebagai contoh, Gratianus mengeluarkan dekret yang melawan seks oral dan anal.
7. Tiga teori utama tentang prokreasi selalu dipegang: (1) teori Aristoteles yang menunjukkan bahwa benih laki-laki aktif terhadap perempuan yang pasif; (2) teori Stoa yang memandang tubuh berasal dari benih laki-laki dan jiwa muncul daripersatuan antara jiwa laki-laki dalam benih tersebut dengan jiwa perempuan dalam rahim; (3) teori yang meyakini bahwa sperma adalah benih laki-laki dan rahim perempuan adalah ladangnya.
8. *Ibid*, h. 33.
9. *Ibid*, h. 42.
10. Ada banyak tokoh populer yang mengikuti gagasan ini, yaitu Jeremy Bentham, James Mill, Francis Place, Robert Dale Owen dan Charles Knowlton. Mereka memulai gerakan yang menjadikan kontrasepsi sebagai isu internasional.
11. Dari kondisi ini kita akhirnya mengenal teolog anak zaman semacam Bernard Haring, Josef Fuchs dan Herald Kelly.

12. *Ibid*, h. 60.
13. Kubu konservatif (Kardinal Ottaviani, Browne, Ruffini) menganggap draf tersebut bertentangan dengan ajaran para pendahulu. Sementara kubu progresif (Kardinal Suenens, Alfrink, Leger dan Patriark Maximus IV) menganggap draf tersebut tidak mengubah ajaran kontrasepsi secara mendasar. Perdebatan berlangsung sampai dengan November 1965. Komisi khusus Kepausan dibentuk, beranggotakan 65 orang yang mencakup uskup, teolog, dokter, ekonom, demografer, sosiolog, dan pasangan menikah. Dua laporan mayoritas dan minoritas akhirnya berbuah pada ensiklik *Humanae Vitae* (29 Juli 1968).
14. Kippley, John F., *Covenant Christ and Contraception*, New York: St. Paul, 1970, h. 65-88.
15. Kippley menunjukkan keterkaitan pendekatan argumen sosiologis ini dengan konsep baru tentang manusia (h. 66), prinsip aktivitas manusia yang utuh (h. 73), konsientisasi (h. 82), prinsip pengesampingan hak (h. 86) dan prinsip kompromis (h. 88).
16. *Bdk.* Kusmaryanto, CB., *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Grasindo, 2004, h. 180.
17. Dupre, Louis, *Contraception and Catholics: A New Appraisal*, Baltimore: Garamond/Pridemark Press, 1964, h. 73.
18. Grisez, Germain G., *Contraception and the Natural Law*, Milwaukee: Impact Books, 1964, h. 46.
19. Grisez, Germain, "Infallibility and Contraception: A Reply to Garth Hallett", dalam *Theological Studies*, 1986, h. 134-145.
20. Connor, SA., "Contraception and the Contralife Will", dalam *Gregorianum* 72, 1991, h. 705-724. Yang termasuk dalam kontravita (melawan kehidupan) adalah spiral atau IUD (*Intrauterine Devices*, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), RU-486, *morning after pill* yang juga sering disebut *emergency contraceptives*, POPs (*Progestin-Only Pills*) dan Depo-Provera. Sedangkan kondom termasuk mencegah terjadinya pembuahan sehingga bersifat kontraseptif. Yang disetujui oleh gereja adalah sistem kalender. (*lih.* Kusmaryanto, CB., 2004, h. 192).
21. Marshner, WH., "Can a Couple Practicing NFP Be Practicing Contraception?", dalam *Gregorianum* 77, 1996, h. 677-704.
22. *Kedaulatan Rakyat*, 25/4/05, h. 15.
23. Witdarmono, H., "Gereja Butuh Jembatan yang Kokoh", *Kompas* 17/4/05, h. 1.
24. *Kompas*, 20/4/05.
25. McCormick, Richard, "The Teaching Office as a Guarantor of Unity in Morality",

- dalam *Concilium* no 150, 1981, h. 72-81.
26. Curran, Charles E., "Church Teaching", dalam Curran, *The Catholic Moral Tradition Today*, Washington DC, Georgetown University Press, 1999, h.197-8.
 27. Curran, Charles E., "Authority and Dissent in the Church", dalam *Origins*, 1986, h. 375. Konferensi Para Uskup Amerika Serikat (1968), menunjuk tiga kriteria penolakan teologis terhadap ajaran resmi: alasan seirus dan berdasar, tidak mempertanyakan otoritas gereja, dan bukan merupakan skandal.
 28. Haring menyebut para teolog moral adalah *tradisionalis*, untuk memperkenalkan masing-masing generasi dalam konteks historis ke dalam kebenaran agung sebagaimana diwahyukan oleh Yesus Kristus (*lib.* Bernard Haring, "The Role of the Catholic Moral Theologian", dalam Charles E Curran, *Moral Theology: Challenges for the Future*, New York: Paulist Press, 1990, h. 33). Tugas utama *diakonia* teolog moral adalah mediator, bukan pelayanan 'satu jalur' (*one-way ministry*). Seperti *satyagrahi*, penyampai pesan damai ala Hinduisme, para teolog moral meragakan diri sebagai *wounded healer*. GS 16 menunjuk hati nurani untuk mencari kebenaran.